

BIRO UMUM
MAHKAMAH AGUNG - RI

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda : 8669/BUA.7/TU/W5/X/2018

BIASA

Tanggal : 22-10-2018


Tanggal/Nomor : 19-10-2018 / 2537/KP.04.00/10/2018

Asal : MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MK-RI)

Hal : PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PANITERA

Sdr. KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS

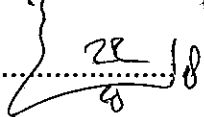
Agar Ditindaklanjuti

 28/10/18

Diteruskan:
Yth

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

 28/10/18

372063

23 OCT 2018.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor : 2537 /KP.04.00/10/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Panitera

19 Oktober 2018

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di
Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami beritahukan bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Panitera Mahkamah Konstitusi yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Desember 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Panitera Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri.

Pengumuman seleksi terbuka dapat dilihat pada laman Mahkamah Konstitusi dan melamar secara *online* pada laman Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.go.id mulai tanggal 4 Oktober s.d. 24 Oktober 2018.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal
Selaku Sekretaris Panitia Seleksi,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
2. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Lampiran Surat

Nomor : 2537 /KP.04.00/10/2018

Tanggal : 19 Oktober 2018

DAFTAR LAMPIRAN

I. SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ✓
2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

II. SEKRETARIS KEMENTERIAN DAN SETINGKAT KEMENTERIAN

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia
4. Deputy SDM Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

III. DEKAN

1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
4. Fakultas Hukum Universitas Batam
5. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
6. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
7. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
8. Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
9. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
10. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
11. Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo
12. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
13. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
14. Fakultas Hukum Universitas Jambi
15. Fakultas Hukum Universitas Jember
16. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
17. Fakultas Hukum Universitas Khairun
18. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
19. Fakultas Hukum Universitas Lampung
20. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
21. Fakultas Hukum Universitas Mataram
22. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
23. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
24. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
25. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

26. Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
27. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
28. Fakultas Hukum Universitas Pattimura
29. Fakultas Hukum Universitas Riau
30. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
31. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
32. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
33. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
34. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
35. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
36. Fakultas Hukum Universitas Tadulako
37. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
38. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
39. Fakultas Hukum Universitas Udayana
40. Fakultas Hukum Universitas Al Asyariah Mandar
41. Fakultas Hukum Universitas Musamus
42. Fakultas Hukum Universitas Papua